

# Tim Apprasial Tak Hadir, Hearing Warga Terdampak Bendungan Bagong Bersama DPRD Trenggalek Dibatalkan

Agus Riyanto - [TRENGGALEK.INDONESIAID.ID](http://TRENGGALEK.INDONESIAID.ID)

Mar 10, 2022 - 23:41



*Suasana pertemuan warga terdampak Bendungan Bagong dengan Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek*

Trenggalek - Warga Terdampak Bendungan Bagong yang tak terima ganti rugi lahan Kembali mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Tujuannya adalah bertemu dengan Komisi I untuk melakukan hearing dan dipertemukan

dengan tim appraisal. Namun, rencana tersebut gagal digelar. Karena, Tim appraisal tidak bisa hadir.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin mengatakan, hearing dengan warga terdampak Bendungan Bagong tidak bisa digelar hari ini. Karena, tim appraisal tidak bisa hadir. Oleh karena itu, ini akan menjadi catatan Komisi I dan akan dilaporkan kepada Ketua DPRD.

" Sebenarnya kita akan memfasilitasi permintaan warga terdampak Bendungan Bagong dengan pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta BBWS. Namun, kedua pihak belum bisa hadir secara langsung untuk menjelaskan duduk persoalannya serta solusi terbaik atas permasalahan warga terdampak, " ucapnya, Jumat (4/3/2022).

Alwi menuturkan, dalam hal ini Komisi I hanya bertindak sebagai fasilitator permintaan warga, untuk bisa berkomunikasi dengan tim appraisal, terkait ketidakpuasan nilai ganti rugi lahan yang ditentukan.

" Kami sudah melakukan sidak ke lokasi untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Ternyata, banyak perhitungan yang terlewatkan. Seperti ada bangunan di atas tanah yang di appraisal, namun hanya tanahnya yang masuk perhitungan, " imbuhnya.

Selain itu, politisi dari PKS ini menyebut, ada perhitungan tanaman yang terlewatkan. Contohnya, ada tanaman yang jumlahnya lima hanya dimasukkan tiga. Meskipun dalam pendataan tim appraisal, Komisi I tidak tahu persis terkait prosesnya. Namun demikian, Komisi I akan tetap melayani permintaan warga.

" Intinya, dalam rapat ini belum ada hasil atau solusi. Karena, warga belum bisa bertemu dengan tim appraisal. Sementara itu, untuk permintaan perubahan harga bukan ranah Komisi I atau DPRD. Kami akan menindaklanjuti dengan berkomunikasi di atasnya, " tutupnya (ags).